



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**SATUAN KERJA  
KECAMATAN JATIRO**

**SEKRETARIAT  
JLL. GAJAH MADA NO 2  
JATIROTO  
KODE POS 67355  
KECAMATAN JATIROTO**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Jatiroto, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 1 Tahun Anggaran 2023 Di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 31 Januari 2024



CAMAT JATIROTO

**KUTUM HADI KASIYAN, S.H.**

NIP. 196804071989031006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Penjelasan Umum Organisasi	1
2. Permasalahan Umum / Isu Strategis yang dihadapi.	7
<b>BAB II: PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>18</b>
1. Tujuan OPD	18
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
<b>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>23</b>
1. Realisasi dan Capaian Tahun 2023	25
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya ( 5 Tahun Periode Renstra)	28
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun Terakhir Renstra	29
4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Kecamatan Randuagung	30
5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan per indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan Tujuan dan Sasaran.	31
6. Upaya peningkatan / solusi alternatif yang telah dilakukan.	34
7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	44
8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	45

<b>B. Realisasi Anggaran</b>	.....	<b>50</b>
1. Realisasi Anggaran Program	.....	<b>50</b>
2. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub kegiatan	.....	<b>51</b>
3. Realisasi Total.	.....	<b>54</b>
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	.....	<b>55</b>
1. Simpulan Umum capaian kinerja;	.....	<b>55</b>
2. Langkah / strategi mendatang untuk peningkatan kinerja kedepan.	.....	<b>55</b>

#### **LAMPIRAN**

1. Dokumen PK Camat Tahun 2023;
2. Dokumentasi Kegiatan;
3. Dokumen Lain yang dianggap perlu.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

#### **a. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang dimaksud kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan dipimpin oleh Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

#### **a. Camat**

#### **b. Sekretariat Kecamatan**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Pelayanan Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

➤ **Tugas Pokok**

**1. Tugas Pokok Camat**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN JATIROTO  
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



**b. Sumber Daya Aparatur**

Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah PNS dan Non PNS Kecamatan Jatiroto**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	TKB	
1.	SD	-	-	1	1
2.	SMP	1	-	-	1
3.	SMA/SMK	5	-	3	8
4.	D1	-	-	-	-
5.	D2	-	-	-	-
6.	D3	2	-	-	2
7.	S1	4	-	3	7
8.	S2	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>12</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiroto Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin Tahun 2023**

No.	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	TKB	
1.	Laki-Laki	9	-	4	13
2.	Perempuan	3	-	4	7
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Aset Kantor Kecamatan Jatiroto**  
**Tahun 2023**

NO	PEMBIDANGAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP)
1	<b>GOLONGAN TANAH</b>	1	<b>Bidang</b>	<b>325,866,000.00</b>
2	TANAH	1	Bidang	325,866,000.00
3	<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>242</b>	<b>Buah / Set</b>	<b>930,181,283.00</b>
4	ALAT BESAR	1	Buah / Set	3,000,000.00
5	ALAT ANGKUTAN	9	Buah	275,676,000.00
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	Buah	-
7	ALAT PERTANIAN	-	Buah / Set	-
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	192	Buah	464,998,283.00
9	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3	Buah	4,668,000.00
10	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	Buah	-
11	ALAT LABORATORIUM	-	Buah	-
12	ALAT PERSENJATAAN	-	Buah	-
13	KOMPUTER	37	Buah	181,839,000.00
14	ALAT EKSPLORASI	-	Buah	-
15	ALAT PENGEBORAN	-	Buah	-
16	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	Buah	-
17	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	Buah	-
18	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	Buah	-
19	ALAT PERAGA	-	Buah	-
20	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	Buah	-
21	RAMBU - RAMBU	-	Buah	-
22	PERALATAN OLAH RAGA	-	Buah	-

23	<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	5	Buah	1,255,756,921.00
24	BANGUNAN GEDUNG	5	Buah	1,255,756,921.00
25	MONUMEN	-	Buah	-
26	BANGUNAN MENARA		Buah	
27	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		Buah	
28	<b>GOLONGAN JALAN. IRIGASI, DAN JARINGAN</b>	-	<b>Buah</b>	<b>-</b>
29	JALAN DAN JEMBATAN	-	Buah	-
30	BANGUNAN AIR	-	Buah	-
31	INSTALASI	-	Buah	-
32	JARINGAN	-	Buah	-
33	<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA</b>	4	<b>Buah / Set</b>	<b>1,500,000.00</b>
34	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	Buah / Set	-
35	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	4	Buah / Set	1,500,000.00
36	HEWAN	-	Ekor / Buah	-
37	BIOTA PERAIRAN		Buah	
38	TANAMAN		Buah	
39	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		Buah	
40	ASET TETAP DALAM RENOVASI		Buah	
41	<b>GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	-	<b>Buah</b>	<b>-</b>
42	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	Buah	-
		<b>252</b>		<b>2,513,304,204.00</b>

## II. PERMASALAHAN / ISU STRATEGIS

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto yaitu kurangnya terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

### a. Faktor Masalah

- Kurangnya Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik;
- Penilaian BPK terkait kinerja keuangan dan asset daerah masih kurang;
- Masih sering terjadi gangguan keamanan;
- Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada masih cukup tinggi;

- Masih sering terjadi gangguan keamanan;
- Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada masih cukup tinggi;
- Kurangnya pembangunan yang berbasis gender;
- Rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri;
- Adanya Pandemi Covid 19

**b. Akar Masalah**

- a. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan;
- c. Kurang optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana perijinan;
- d. Kurang optimalnya pelayanan kedinasan;
- e. Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- f. Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang;
- g. Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi;
- h. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public;
- i. Belum optimalnya tertib penatausahaan keuangan daerah;
- j. Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- l. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum;
- n. Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan;
- p. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsive gender;
- q. Kurang optimalnya upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh desa;
- r. Kurangnya peningkatan kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- s. Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal;

- t. Kurangnya Pemberdayaan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- u. Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah Covid 19;

Tabel 6

T-B 35

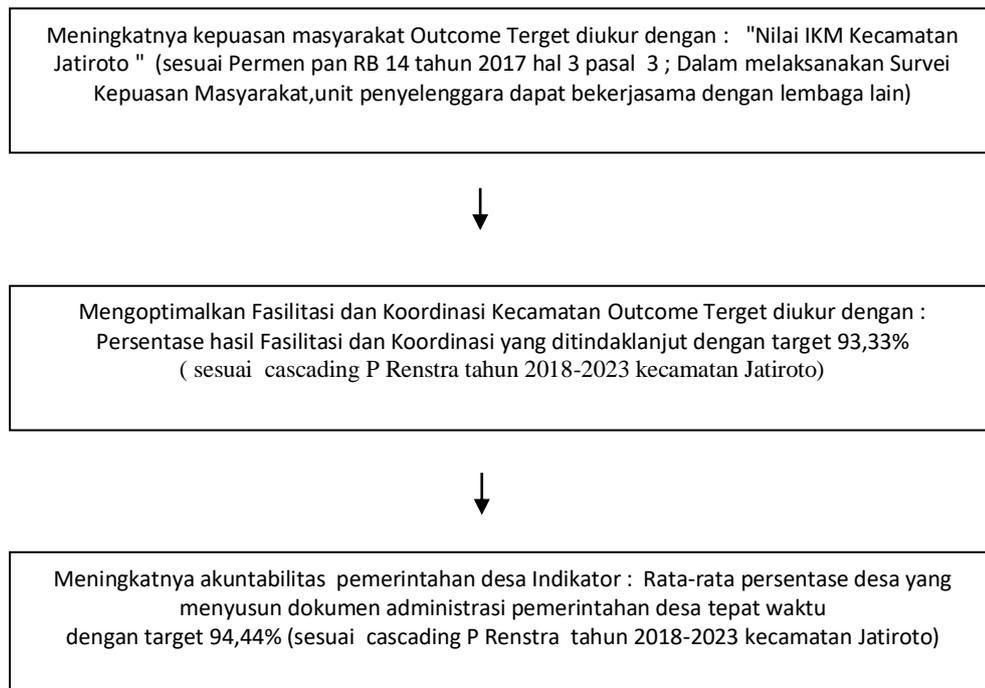
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN  
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			Kurang optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana Perijinan
			Kurang optimalnya pelayanan Kedinasan
			Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang
			Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi
			Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
		Penilaianan BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah masih kurang	Belum Optimalnya tertib penatausahaan keuangan daerah
			Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik daerah
		Masih sering terjadi gangguan keamanan	Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada masih cukup tinggi	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum			
2	Rendahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis gender	Kurangnya pembangunan yang berbasis gender	Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil di lapangan sulit diketahui
			Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
		Rendahnya jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri	Kurang optimalnya upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh Desa
			Kurangnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
			Kurangnya kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa
			Proses Perencanaan Pembangunan Desa belum optimal
			Kurangnya Pemberdayaan masyarakat, Lebaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
		Adanya Pandemi Covid 19	Kurang optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19

### c. Pohon Kinerja

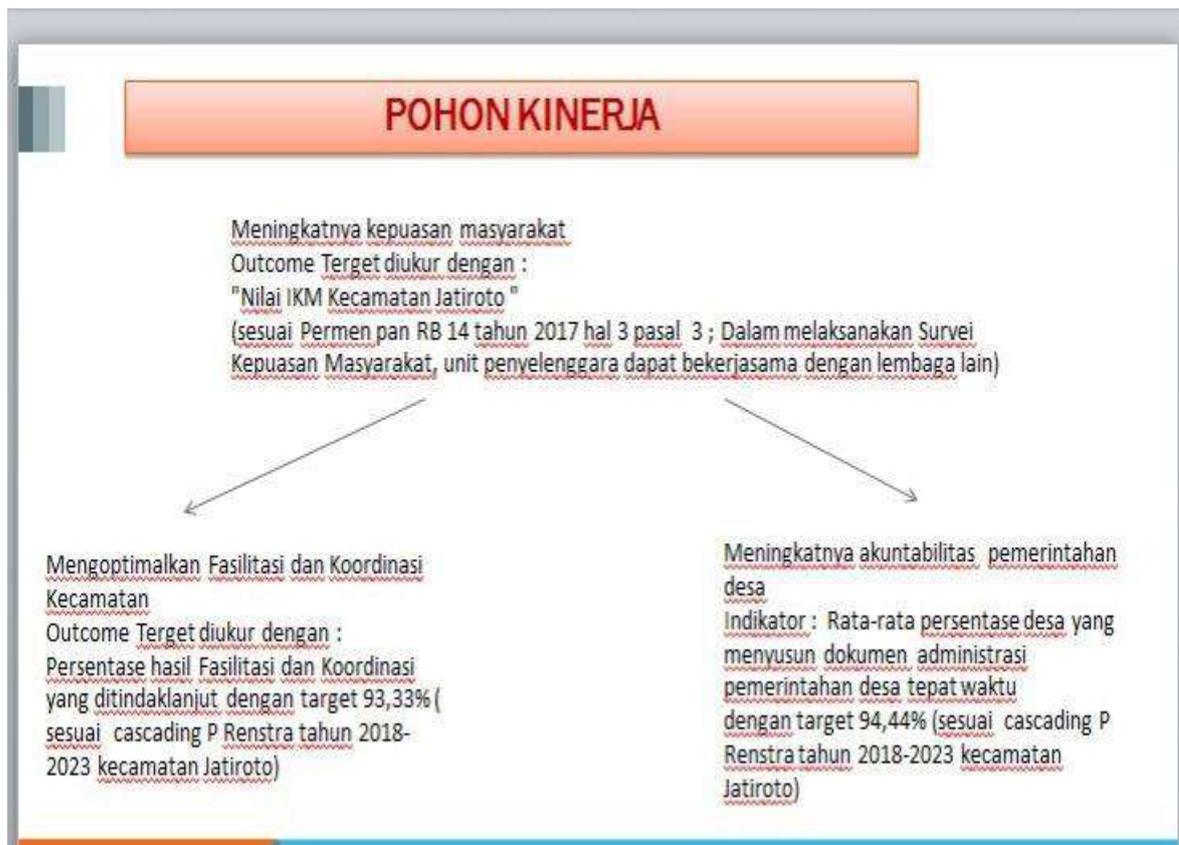
Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal. Pohon kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 2. Matriks Pohon Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

Kecamatan Jatiroto telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan *outcome* pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga *level* operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Kecamatan Jatiroto didasarkan pada teori GRC (*governance risk management dan control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kecamatan Jatiroto pada khususnya.



## POHON KINERJA

Meningkatnya kepuasan masyarakat  
 Outcome Target diukur dengan :  
 "Nilai IKM Kecamatan Jatiroto"  
 (sesuai Permen pan RB 14 tahun 2017 hal 3 pasal 3 ; Dalam melaksanakan Survei  
 Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat bekerjasama dengan lembaga lain)

Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi  
 Kecamatan  
 Outcome Target diukur dengan :  
 Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi  
 yang ditindaklanjuti dengan target 93,33% (  
 sesuai cascading P Renstra tahun 2018-  
 2023 kecamatan Jatiroto)

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan  
 desa  
 Indikator : Rata-rata persentase desa yang  
 menyusun dokumen administrasi  
 pemerintahan desa tepat waktu  
 dengan target 94,44% (sesuai cascading P  
 Renstra tahun 2018-2023 kecamatan  
 Jatiroto)

Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan  
 Outcome Target diukur dengan :  
 Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti  
 dengan target 93,33% (sesuai cascading P Renstra tahun 2018-  
 2023 kecamatan Jatiroto)

Outcome Program  
 Terlaksananya  
 Administrasi  
 Perkantoran yang  
 tepat waktu  
 Indikator :  
 Persentase  
 pemenuhan  
 fasilitasi kebutuhan  
 operasional  
 perkantoran)

Outcome Program  
 Meningkatnya  
 Penyelenggaraan  
 Pemerintahan Dan  
 Pelayanan Publik yang  
 sesuai ketentuan  
 Indikator : persentase  
 Pelayanan Administrasi  
 Kecamatan sesuai SP dan  
 SOP

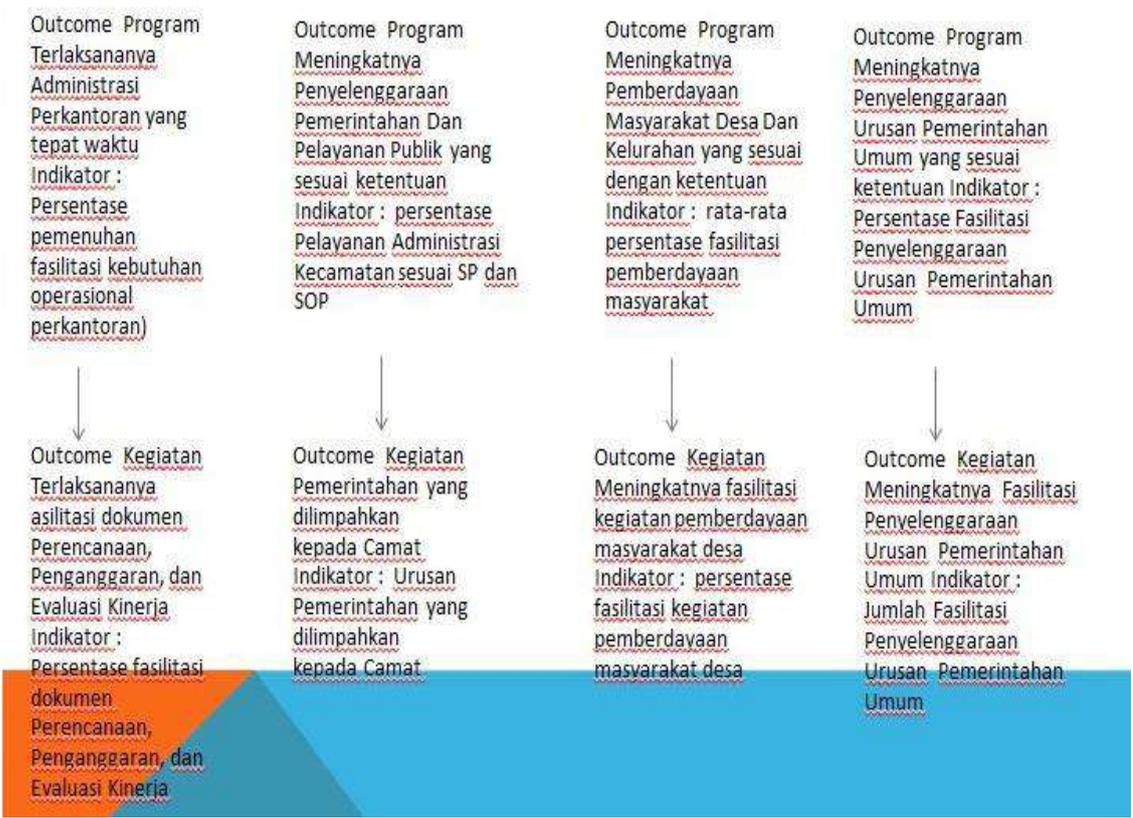
Outcome Program  
 Meningkatnya  
 Pemberdayaan  
 Masyarakat Desa Dan  
 Kelurahan yang sesuai  
 dengan ketentuan  
 Indikator : rata-rata  
 persentase fasilitasi  
 pemberdayaan  
 masyarakat

Outcome Program  
 Meningkatnya  
 Penyelenggaraan  
 Urusan Pemerintahan  
 Umum yang sesuai  
 ketentuan Indikator :  
 Persentase Fasilitasi  
 Penyelenggaraan  
 Urusan Pemerintahan  
 Umum

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa  
 Indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dengan target 94,44% (sesuai cascading P Renstra tahun 2018-2023 kecamatan Jatiroto)



Outcome Program  
 Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan ketentuan Indikator :  
 1, Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu  
 2, Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu  
 3, Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu



Konsep pohon kinerja Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

**a. Nilai IKM Kecamatan Jatiroto**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto adalah **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**, Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

**b. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan**

Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto Tahun 2018-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Jatiroto mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	a. Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik	Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk
			Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			Mengoptimalkan pelayanan, sarana dan prasarana Perijinan
			Mengoptimalkan pelayanan Kedinasan
			Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat
			Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tupoksi
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

		Meningkatkan Penilaianan BPK terkait kinerja keuangan dan aset daerah	Mengoptimalkan tertib penatausahaan keuangan daerah
			Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik daerah
		Menanggulangi gangguan keamanan	Menanggulangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Mengurangi Pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan / atau Perkada	Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum
	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Meningkatkan pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil di lapangan bisa diketahui
			Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
		Meningkatkan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri	Mengoptimalkan upaya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes) di seluruh Desa
			Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa			
	Mengoptimalkan Proses Perencanaan Pembangunan Desa		
	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat		
	Menanggulangi Pandemi Covid 19	Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19	

**c. *Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa***

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Jatiroto yaitu peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Arah Kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto antara lain :

1. Percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah;
2. Membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal;
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas;
4. Melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### I. TUJUAN OPD

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu “**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**” dengan indikator tujuan adalah 1. IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto, 2. Persentase hasil, fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3. Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2023 maka Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan indikator sasaran dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JATIROTO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	84,12

## II. PERJANJIAN KINERJA

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Dalam Perjanjian Kinerja ini , terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja selama Tahun 2023 detail sebagai berikut :

**TABEL INFORMASI SUBSTANSI  
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
CAMAT JATIROTO TAHUN 2023**

NO	SUBSTANSI PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
1	Target Sasaran Program Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	91,56 %	100 %	Semua kegiatan program bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun, meskipun ada kegiatan yang tidak ditunjang dengan anggaran karena Kegiatan bisa dilaksanakan dengan swadaya
2	Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1,725,576,486,00	Rp. 1.679.792.252,00	Selfblocking P-APBD 22 per September
3	Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 156,595,000,00	Rp. 105.145.000,00	Selfblocking P-APBD 22 per September
4	Mutasi Camat	Iwan Hadi Purnomo, S.STP. M.M.	Kutum Hadi Kasiyan , S.H.	Mutasi Camat Jatioto 1 April 2023 dengan Nomor SK. Mutasi : 821/98/427.72/2023

**a. Perjanjian Kinerja Awal 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,33%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	94,44%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,56%
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 83%

Program	Anggaran (Rp.)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1,725,576,486,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,200,000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	156,595,000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,585,000,00
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,400,000,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163,935,000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2,062,291,486,00</b>

**b. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,33%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	94,44%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	4. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 5. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 6. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 83%

Program	Anggaran (Rp.)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.743.965.488,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,200,000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	105.145.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,585,000,00
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,400,000,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163,935,000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.029.230.488,00</b>

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah adalah :

1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukanj Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan

2. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### I. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Pada akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$	:	Baik
$55 \leq x < 70$	:	Cukup Baik
$x < 55$	:	Kurang Baik

Secara umum Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Tahun 2022 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan Tahun 2023. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023 oleh Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ada 1 (satu) indikator sasaran saja.

### 1. Realisasi dan Capaian Tahun 2023

Capaian Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100 %

➤ **Faktor pendorong keberhasilan kinerja:**

1. Indikator Tujuan

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
- b. Adanya koordinasi dan evaluasi internal secara berkala
- c. Pelayanan Tepat Waktu
- d. Adanya inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan online (Ayam Endul)

2. Indikator Sasaran

- a. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara kecamatan dengan pemerintah desa, PTPN XI, SGN, Kabupaten dan Forkompimcam
- b. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
- c. Adanya inovasi Ngobras Klambi
- d. Aparatur pemerintah Kecamatan sudah memahami mekanisme penyusunan dokumen pemerintahan desa

➤ **Faktor penghambat pencapaian kinerja:**

1. Indikator Tujuan

- a. Perilaku petugas yang kurang 3S (Salam, senyum, sapa) dalam melaksanakan tugas pelayanan kependudukan kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelaksanaan tugas secara optimal
- c. Pengelolaan Pengaduan belum optimal

2. Indikator Sasaran

- a. Beberapa Aparatur kecamatan yang kurang memahami tupoksi masing-masing
- b. Kompetensi aparatur Perangkat desa kurang maksimal Kondisi
- c. keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Jatiroto yang belum kondusif
- d. 3 Desa diwilayah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN XI PG
- e. Sarana dan Prasaran belum memadai

## RUMUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab	
	1	2	3	4	5	
1.	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100 \%$	<p>Penjelasan : Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah seluruh Aktifitas Fasilitas dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan kecamatan sesuai kewenangan</p>	Seluruh Seksi dan Seluruh Subbagian	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu})}{\text{Jumlah Seluruh Desa diwilayah Kecamatan} \times 3} \times 100\%$ <p>Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<p>Penjelasan : Dokumen APBDesa , RKPDesa , LPPD Desa dikirim tepat waktu paling lambat akhir bulan September</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKPDesa Tepat waktu ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir September</li> <li>- APBDesa paling lambat tgl 31 Desember</li> <li>- Laporan LPPDesa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran</li> </ul>	Seksi Pemerintahan	Camat

## 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya ( 5 Tahun Periode Renstra)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA						CAPAIAN KINERJA					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	-	83,55	84	83,12	83,85	84,12	-	83,5	84	83,12	87,78	78,94
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91.5	92	92.67	90	91.33	93,33	91.5	90	88	90	87,30	85,71
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	89	81.67	80	83.33	88.33	94,44	89	81	80	83,33	88,33	88,89

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun Terakhir Renstra

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA 2023</b>	<b>REALISASI KINERJA 2023</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	<b>84,12</b>	<b>78,94</b>
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<b>93,33</b>	<b>85,71</b>
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<b>94,44</b>	<b>88,89</b>

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Kecamatan Randuagung

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kecamatan Randuagung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	84,12	78,94	80,46
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93.33	85,71	-
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	94.44	88,89	-

Keterangan :

Berdasarkan hasil perbandingan data di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang , belum ditemukan data yang mendukung yang sesuai dengan indikator kinerja yang memiliki kerawanan kondisi dan karakteristik dengan Kecamatan Jatiroto.

**5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan per indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan Tujuan dan Sasaran.**

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik masih kurang	Kurang optimalnya pendaftaran penduduk
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang
			Kurang optimalnya pelayanan perijinan
			Kurang optimalnya pelayanan Kedinasan
			Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi
		Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan kurang terlatih dan terbina	
		Kinerja keuangan dan penatausahaan aset daerah masih kurang	Kurang optimalnya pencatatan aset daerah
		Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif	Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Kecamatan belum optimal
Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi		
	Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi		
Masih sering terjadi gangguan keamanan	Masih banyak gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan		

		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
			Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
		Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan	Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
			Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tepat waktu
			Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

#### b. Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik	Mengoptimalkan pendaftaran penduduk
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
		Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat
		Mengoptimalkan pelayanan perijinan
		Mengoptimalkan pelayanan Kedinasan
		Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
		Menyediakan Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
		Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan
	Meningkatkan kinerja keuangan dan penatausahaan aset daerah	Mengoptimalkan pencatatan aset daerah
	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Mengoptimalkan Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat		Memfasilitasi Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
		Memfasilitasi Pemberdayaan masyarakat

Menanggulangi gangguan keamanan	Mengurangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
	Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	Mengoptimalkan Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
	Menyelesaikan administrasi keuangan desa tepat waktu
	Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

## **6. Upaya peningkatan / solusi alternatif yang telah dilakukan.**

Dalam upaya peningkatan kinerja pada kecamatan jatiroto , telah dilakukan berbagai penerapan inovasi antara lain sebagai berikut :

### **1. JUDUL INOVASI : KOORDINASI KE DESA PERIHAL PERMINTAAN DATA ( ORKES RIANTA )**

#### **I. Keadaan Masalah yang ada**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang di tentukan. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa koordinasi dilaksanakan pada sinkronisasi untuk mendapatkan hasil, waktu yang pantas, selaras dalam rangka mencapai tujuan. Kegiatan melakukan koordinasi melekat dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jatiroto. Untuk menghasilkan data yang akurat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bukan hanya membuat dan mengirim surat permintaan data maupun dokumen ke Desa serta duduk dibelakang meja menunggu balasan pemenuhan Data yang diminta , namun juga berinisiatif untuk jemput bola mendatangi instansi Desa yang diperlukan dalam pemenuhan Data tersebut. Dalam pemenuhan dokumen ini sering ditemukan adanya keterlambatan pemenuhan dokumen yang dilakukan oleh Desa yang berakibat capaian pemenuhan laporan ke tingkat Kabupaten belum sesuai deadline yang ditentukan. sehingga Kasi Pemberdayaan dan Desa Kecamatan Jatiroto beserta staf mempunyai inisiatif langsung mengunjungi Desa maupun Instansi yang diperlukan guna meminta Data tersebut. Hal ini untuk mempermudah pemenuhan dokumen dengan laporan yang tepat waktu ke tingkat Kabupaten Lumajang sehingga dapat tercapai kinerja Seksi Pemberdayaan yang baik.

## **II. Inovasi untuk mengatasi keadaan atau masalah**

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, OPD Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Koordinasi ke Desa Perihal Permintaan Data (Orkes Rianta). Kasi Pemberdayaan dan Desa Kecamatan Jatiroto mempunyai inisiatif langsung mengunjungi ke Desa maupun Instansi yang diperlukan guna meminta Data. Hal ini untuk mempermudah pemenuhan dokumen dengan laporan yang tepat waktu ke tingkat Kabupaten Lumajang sehingga dapat tercapai kinerja Seksi Pemberdayaan yang baik.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta staf dengan cara mengunjungi desa-desa di wilayah Kecamatan Jatiroto Dengan melihat dan berkoordinasi sejauh mana permintaan data yang sudah dipenuhi, selebihnya jika ada salah satu Desa yang pada saat dikunjungi telah selesai menindaklanjuti Permintaan Data maka akan dibawa langsung oleh Tim ( Kasi PMD dan Staf) setelah itu akan ditindaklanjuti oleh Staf Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **III. Penanganan Masalah setelah diterapkan inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Koordinasi ke Desa Perihal Permintaan Data ini terdapat beberapa masalah antara lain adalah ada sebagian Perangkat Desa yang menyepelkan terkait permintaan data dan menunggu Tim dari Kecamatan datang baru bisa menindaklanjuti permintaan tersebut. Untuk ke depannya agar dalam pemenuhan data ini tepat waktu dan tidak ada kesan menyepelkan dalam pemenuhan data dan dokumen ini, maka pada setiap hari Senin Apel Bersama seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lintas Sektor di Halaman Kantor Kecamatan Jatiroto selalu memberikan himbauan kepada Desa agar Kepala Desa rutin mengingatkan Perangkat Desa agar dapat memenuhi permintaan Data maupun dokumen sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan. Hasil yang di dapat setelah dilakukan Inovasi ini Kecamatan dan Desa dapat memenuhi Permintaan Data dan Laporan secara tepat waktu ke Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

## **2. JUDUL INOVASI : SARANA INFORMASI SURAT MENYURAT BERBASIS ONLINE (NASI URAT BASO )**

### **I. Keadaan Masalah yang ada**

Proses kegiatan persuratan yang masih dilakukan secara konvensional dalam pengelolaannya masih perlu dicetak, kemudian juga tampak kumpulan surat yang menumpuk di meja kerja hanya untuk melakukan permintaan persetujuan, *review*, perbaikan serta penelurusan surat yang diperlukan. Hal ini tentu akan sangat merepotkan OPD apabila OPD masih menerapkan proses manual dalam kegiatan surat menyurat. Masalah utama yang paling sering ditemukan adalah hilangnya atau terselipnya sebuah surat yang belum didisposisi. Hal ini tentu sangat krusial, terlebih lagi jika surat yang hilang adalah surat yang sifatnya penting atau *urgent*.

### **II. Inovasi untuk mengatasi keadaan atau masalah**

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, OPD Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Sarana Informasi Surat Menyurat Berbasis Online (Nasi Urat Baso). Sarana yang dipergunakan Berbasis Online ini adalah dengan menggunakan Media WhatsApp dan membentuk Grup di WhatsApp tersebut. Adapun proses pembentukan dan kesepakatan dengan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022 bertempat di Ruang Panti PKK Kecamatan Jatiroto dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
2. Pertemuan membahas pengiriman surat dengan kesepakatan bersama bahwa untuk pengiriman Surat Menyurat dilakukan secara online melalui media WhatsApp dan membentuk grup khusus distribusi surat menyurat dan disepakati bersama bahwa nama Grup Distribusi Surat adalah INFORMASI SURAT MENYURAT KECAMATAN JATIROTO dengan menyepakati bahwa surat yang dikirim tersebut secara resmi sah dan legal ditanda tangani oleh Camat maupun Kepala Desa ;
3. Disepakati bersama bahwa di Grup ini memberikan kemudahan untuk Kecamatan maupun Desa mengirim surat dengan dimonitor oleh Admin masing-masing Desa apabila ada surat yang dikirim agar melakukan print out dan segera disampaikan ke pimpinan;
4. Grup Informasi Surat Menyurat ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Kecamatan dan Desa dalam menyampaikan Surat dan tidak memerlukan lagi Kurir surat untuk mendistribusikan ke masing-masing desa sehingga bisa hemat dan efisien dalam pengeluaran anggaran

5. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Jatiroto, bertugas :

- a. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan Informasi Surat Menyurat dalam rangka percepatan pemenuhan Tindak Lanjut Surat dari Kabupaten;
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inovasi.

6. Ketua

Ketua Tim Inovasi Sarana Informasi Surat Menyurat Berbasis Online adalah Sekretaris Kecamatan Jatiroto, yang bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim
- b. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim

7. Sekretaris

Sekretaris adalah Kasubag. Umum pada Kecamatan Jatiroto, yang bertugas Memonitor hasil print out surat dari Grup

8. Admin Grup Surat Menyurat Berbasis Online bertugas :

- a. Melakukan Print Out Surat dan segera disampaikan kepada Pimpinan
- b. Melakukan Pengiriman Surat dan memberikan informasi kepada Desa tentang adanya Surat yang harus di TL di Grup WhatsApp

9. Anggota Grup WhatsApp Surat Menyurat Berbasis Online ini adalah Sekretaris Desa dan Admin Desa

### **III. Penanganan Masalah setelah diterapkan inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Sarana Informasi Surat Menyurat Berbasis Online ini terdapat beberapa masalah antara lain adalah masih ada sebagian Admin di Desa jarang memantau adanya surat di Grup yang ditujukan kepada desanya masing-masing sehingga Admin Kecamatan masih melakukan koordinasi secara individu. Hal ini juga sering diadakan pergantian Admin yang lebih cekatan dan tanggungjawab dalam memonitor surat surat yang terkirim di Grup. Hasil yang di dapat setelah dilakukan Inovasi ini Kecamatan dan Desa dapat memenuhi administrasi Dokumen secara tepat waktu ke Tingkat Desa , Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

### **3. JUDUL INOVASI : PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ONLINE (AYAM ENDUL)**

#### **I. Keadaan Masalah yang ada**

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan wujud pelayanan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk, dan pencatatan sipil dalam penanganan administrasi kependudukan yang bertujuan menata dan menertibkan dokumen data kependudukan dimana alhasil bagi pelayanan publik, pemerintahan serta kodifikasi lainnya. Pelayanan administrasi kependudukan dapat dikatakan sebagai pelayanan publik dari pemerintah. Dalam mencapai tujuan Administrasi Kependudukan tersebut dibutuhkan pelayanan publik sebagai suatu rangkaian dalam memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan yang disebabkan pandangan masyarakat terhadap kepengurusan dokumen kependudukan yang membutuhkan proses yang berbelit-belit, waktu mengantre yang lama, dan akses tempuh yang jauh. Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dikarenakan pandangan masyarakat yang kurang mengetahui pentingnya dokumen kependudukan, yang mana masyarakat tidak semua mau mengurus dokumen kependudukannya yang disebabkan anggapan pelayanannya masih bertele-tele, kurang adanya kepastian terhadap masyarakat terkait persyaratan administratifnya, mengurus dokumen memakan waktu mengantri yang lama, serta adanya pandemi Covid-19 ini yang menghambat pelayanan Adminduk.

#### **II. Inovasi untuk mengatasi keadaan atau masalah**

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kecamatan Jatiroto, maka Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan Online ( Ayam Endul ).

Inovasi ini berbasis online dengan menggunakan media WhatsApp dan terfasilitasi HP dan Nomor WhatsApp Kecamatan Jatiroto dengan Nomor : 0822-2906-2229.

Adapun proses pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Online sebagai berikut :

1. Pelayanan menggunakan media WhatsApp dan difasilitasi HP Kantor Kecamatan Jatiroto dengan nomor WhatsApp yang sudah diinformasikan "Pelayanan Kecamatan Jatiroto Nomor : 0822-2906-2229;

2. Pelayanan yang masuk dan sesuai prosedur di respon oleh Petugas dan mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang ada;
3. Petugas melaporkan pengguna layanan kepada pimpinan Unit untuk diberikan kepastian dan verifikasi dari pimpinan unit;
4. Apabila ditemukan adanya hambatan dan kurang administrasi , maka petugas segera membalas dengan memberitahukannya kepada pengguna layanan;
5. Apabila persyaratan yang dikirim secara online tersebut sudah lengkap , maka petugas segera memproses layanan yang dibutuhkan serta memberitahukan kembali kepada pengguna layanan agar membawa berkas yang diperlukan oleh petugas pada saat mengambil layanan produk kependudukan yang sudah terbit.

### **III. Penanganan Masalah setelah diterapkan inovasi**

Setelah dilakukan inovasi ini terdapat beberapa masalah antara lain adalah masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan menggunakan layanan berbasis online WhatsApp sehingga OPD Kecamatan Jatiroto terus melakukan sosialisasi nomor pelayanan WhatsApp ini agar Masyarakat di Kecamatan Jatiroto mudah dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan.

#### **4. JUDUL INOVASI : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN TIBA DIRUMAH**

##### **I. Keadaan Masalah yang ada**

Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Jatiroto dalam mengurus Santunan Kematian dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya karena ketidaktahuan mereka tentang administrasi Pemberian Santunan Kematian. Selama ini warga masyarakat akan mengajukan Santunan Kematian hanya apabila mereka dibantu oleh orang lain yang pada akhirnya orang tersebut meminta beberapa persen uang hasil Santunan Kematian sehingga banyak dari warga menjadi calo untuk mengurus administrasi Santunan Kematian dengan harapan dapat insentif hasil Pemberian Santunan Kematian.. Masyarakat belum menyadari bahwa santunan kematian sebenarnya mudah untuk menyelesaikan administrasinya. Masyarakat terkadang enggan untuk mengurus administrasi santunan kematian yang menurut mereka masih sulit, sehingga meminta bantuan orang lain untuk menguruskan dan mereka hanya menerima 75% dari santunan kematian yang diterima.

##### **II. Inovasi untuk mengatasi keadaan atau masalah**

Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, SKPD Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah Masyarakat yang berduka sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor kecamatan, namun tim Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah akan mendatangi masyarakat tersebut . Adapun Pelayanan yang kami berikan yaitu

###### **a. Pengarah**

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Jatiroto, bertugas :

- 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inovasi Santunan Kematian Tiba Di Rumah

###### **b. Ketua**

Ketua Tim Inovasi Santunan Kematian Tiba Di Rumah adalah Sekretaris Kecamatan Jatiroto, yang bertugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim
- 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap laporan Pemberian Santunan Kematian

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Jatiroto, yang bertugas :

- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan Inovasi Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah.
- 2) Menyusun laporan Pemberian Santunan Kematian.

d. Anggota

- 1) Menerima berkas permohonan masyarakat tentang Santunan Kematian.
- 2) Mengantarkan Santunan Kematian Tiba Dirumah.

### **III. Penanganan Masalah setelah diterapkan inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Pemberian Santunan Kematian Tiba Dirumah terdapat beberapa masalah antara lain adalah tidak adanya operasional BBM khusus sehingga tim secara Swadaya / sukarela untuk mengantarkan santunan Kematian tersebut. Hasil yang di dapat setelah dilakukan Inovasi ini masyarakat merasa pemerintah hadir dan dekat dengan masyarakat yang sangat membutuhkan biaya setelah mengalami duka ditinggalkan keluarga.

## **5. JUDUL INOVASI : NGOBROL SANTAI KOORDINASI LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BINWAS DESA, DAN INFORMASI ( NGOBRAS KLAMBI )**

### **I. Keadaan Masalah yang ada**

Banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan di Desa sebagai leading sektor Pemerintahan serta Kondisi Permasalahan di desa tidak sama antara desa satu dengan yang lain menjadi kendala Desa dalam memenuhi Administrasi yang ada di Desa. Kegiatan Bimbingan dan Pengawasan yang dilakukan Kecamatan secara Prosedural kurang efektif dalam mendorong efektifitas Desa memenuhi time schedule yang diterapkan baik itu perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam menjalankan sistem Pemerintahan yang baik dan Berintegritas

### **II. Inovasi untuk mengatasi keadaan atau masalah**

Berkaca dari Kekurangan kami di tahun 2021 dimana bahkan Dokumen Perencanaan baru diserahkan di awal tahun berikutnya, Maka Dari semua latar belakang masalah tersebut diatas, OPD Kecamatan Jatiroto membuat Inovasi berupa Ngobrol Santai Koordinasi Layanan Administrasi Pemerintahan Binwas Desa dan Informasi (Ngobras Klambi). Adapun tahapan kami dalam membentuk Inovasi Ngobras Klambi ini antara Lain:

1. Melakukan Pendekatan ke desa dengan mendatangi masing masing kantor Desa
2. Melakukan pemetaan masalah di tiap tiap desa yang tidak sama untuk di diskusikan bersama nantinya
3. Membuat grup WA Forum Komunikasi antar desa dan Kecamatan yang khusus di dalamnya para Sekretaris Desa sebagai motor penggerak kegiatan di Desa dan Juga Tenaga Pendamping Desa
4. Melakukan Pendekatan secara emosional dengan membuat kegiatan arisan anjongsana kerumah Sekretaris Desa yang nantinya di dalamnya akan dibahas Program Kegiatan sesuai time schedule serta Informasi terbaru yang harus diketahui oleh Desa
5. Melibatkan Tenaga Pendamping Profesional dan Tenaga Pendamping Desa ikut dalam anjongsana guna menyampaikan informasi informasi aturan terbaru, Misal nya program prioritas sesuai Kemendesa atau Aturan pencairan DD dan ADD ataupun capaian Progres Desa
6. Menetapkan batas waktu pengumpulan dokumen dokumen sesuai kesepakatan bersama di dalam anjongsana

### **III. Penanganan Masalah setelah diterapkan inovasi**

Setelah dilakukan inovasi Obras Klambi ini Desa mampu dan bisa menyelesaikan Administrasi pemerintahan baik itu Perencanaan, Penganggaran dan juga Pertanggungjawaban. Informasi terbaru yang disampaikan oleh Pendamping Desa turut juga menjadi faktor pendukung untuk Desa Desa mencapai kesepakatan yang sama. Jadi tidak ada lagi disinformasi antara Desa yang satu dan yang lain, sehingga tercipta gotong royong antar desa, saling membantu apabila Desa lain nya ada kendala dan salah satu pencapaian yang dirasakan sampai dengan hari ini yaitu kami mampu menyelesaikan dokumen perencanaan tepat waktu di bulan September.

## 7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Jatiroto didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran	Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100	100	100%	1.743.965.488	1.687.575.718	96,77%	3,23%	0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100	100	100%	1,200,000	1.200.000	100%	0	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,56	100	100%	105.145.000	103.648.000	98,58%	1,42%	0
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%	12.585.000	12.585.000	100%	0	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100%	2.400.000	2.400.000	100%	0	0
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes , PBDdes, LPPDes, tepat waktu,	10	100	100%	163.935.000	162.180.000	98,93%	1,70%	0

Sumber : Laporan Akutansi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Kecamatan Jatiroto dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran Tahun 2023.

## 8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kecamatan Jatiroto dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 2 program utama dan 1 program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiroto secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Jatiroto. Berikut adalah kegiatan / aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Jatiroto :

Sasaran	Indikator	Proram/Kegiatan	Keterangan	
			Menunjang secara langsung	Menunjang secara tidak langsung
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		V
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	V	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	V	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	V	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	V	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	V	

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi</li> <li>2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.</li> <li>3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDDesa dan LPPDesa serta melakukan pembinaan langsung ke desa</li> <li>2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu</li> <li>3. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.</li> </ol>	Januari s/d Maret 2023
3	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran</li> <li>2. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan</li> <li>3. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran</li> <li>4. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023

4	<p>Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangancamat</li> <li>2. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</li> <li>3. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiaptribulanan kepadaatasan guna dilaporakan ke Kabupaten</li> <li>4. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</li> <li>5. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiaptribulanan kepadaatasan guna dilaporakan ke Kabupaten</li> <li>6. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</li> <li>7. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiaptribulanan kepadaatasan guna dilaporakan ke kabupaten</li> </ol>	<p>Januari s/d Desember 2023</p>
---	---	---	----------------------------------

5	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pendataan fasilitas pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data</li> <li>3. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</li> <li>5. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023
6	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pendataan fasilitas pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data</li> <li>3. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023
6	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>2. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>3. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023

7	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman</li> <li>2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan</li> <li>3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023
8	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman</li> <li>2. Melakukan nonev terkait pencapaian</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023
9	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman</li> <li>2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan</li> <li>3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu</li> </ol>	Januari s/d Desember 2023

## II. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Kecamatan Jatiroto dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Bupati. Target Kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam Pejanjian Kinerja yang telah dibuat antara Camat Jatiroto dan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab Kecamatan Jatiroto untuk dikelola secara transparan , efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### 1. Realisasi Anggaran Program

NO	PROGRAM	PAGU	sd Desember 2023	
			REALISASI	%
		10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,743,965,488	1,687,575,718	96.77
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,200,000	1,200,000	100.00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	105,145,000	103,648,000	98.58
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,585,000	12,585,000	100.00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,400,000	2,400,000	100.00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163,935,000	162,180,000	98.93
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.029.230.488</b>	<b>1.969.588.718</b>	<b>97,06</b>

## 2. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	KEGIATAN	Kinerja Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6.139.200</b>	<b>87,70%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,500,000	1,500,000	100.00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000	2.000.000	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000	2.639.200	75,41%
	<b>Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,232,263,225</b>	<b>1,189,004,934</b>	<b>96,49%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,208,317,225	1,165,215,434	96,43%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21,276,000	21,276,000	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,920,000	1,763,500	91,85%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750,000	750,000	100.00%
	<b>Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	<b>100.00%</b>
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	400,000	400,000	100.00%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	310,000	310,000	100.00%
	<b>Kegiatan 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5,994,000</b>	<b>5,994,000</b>	<b>100.00%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5,994,000	5,994,000	100.00%
	<b>Kegiatan 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75,000,993</b>	<b>72,580,543</b>	<b>96,77%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,486,800	1,486,800	100.00%

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,528,443	28,528,443	100.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,615,750	9,507,000	98,87%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,500,000	3,707,300	82.38%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,870,000	29,351,000	95,08%
	<b>Kegiatan 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7,731,483</b>	<b>7,731,483</b>	<b>100.00%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,731,483	7,731,483	100.00%
	<b>Kegiatan 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>227,838,000</b>	<b>220,122,333</b>	<b>96,61%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	41,460,000	37,621,783	90,74%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,378,000	182,500,550	97,92%
	<b>Kegiatan 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>187,427,787</b>	<b>185,293,225</b>	<b>98,86%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	32,860,000	30,879,325	93,97%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	17,150,000	17,150,000	100.00%
	Sub Kegiatan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137,417,787	137,263,900	99.89%
<b>2</b>	<b>Kegiatan 9 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>100.00%</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,200,000	1,200,000	100.00%

<b>3</b>	<b>Kegiatan 10 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>88,645,000</b>	<b>87,191,000</b>	<b>98.36%</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	600,000	600,000	100.00%
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3,810,000	3,810,000	100.00%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84,235,000	82,781,000	98.27%
	<b>Kegiatan 11 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,457,000</b>	<b>99,74%</b>
	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	3,000,000	3,000,000	100.00%
	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3,000,000	3,000,000	100.00%
	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10,500,000	10,457,000	99,59%
<b>4</b>	<b>Kegiatan 12 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>12,585,000</b>	<b>12,585,000</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8,085,000	8,085,000	100.00%
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4,500,000	4,500,000	100%
<b>5</b>	<b>Kegiatan 13 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2,400,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>75.00%</b>

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2,400,000	2,400,000	100%
<b>6</b>	<b>Kegiatan 14 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>163,935,000</b>	<b>162,180,000</b>	<b>98,93%</b>
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,250,000	1,800,000	80.00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	152,100,000	152,100,000	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,610,000	1,305,000	50,00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5,175,000	5,175,000	100.00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	600,000	600,000	100.00%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1,200,000	1,200,000	100.00%
	Jumlah	<b>2.029.230.488</b>	<b>1.969.588.718</b>	<b>97,06</b>

### 3. Realisasi Total

Anggaran pada Tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Anggaran Belanja Daerah Rp. 2.029.230.488,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 145.149.270,00 dan Belanja Langsung Rp. 1.884.081.218,00 terealisasi sebesar :

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	145.149.270,00	144.995.383,00	99,89
Belanja Langsung	1.884.081.218,00	1.824.593.335,00	96,84
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>2.029.230.488,00</b>	<b>1.969.588.718,00</b>	<b>97,06</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja**

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 2018-2023 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 indikator sasaran strategis yang diukur, 1 indikator kinerja sasaran kinerjanya (88,89%) telah mencapai kategori baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jatiroto dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.029.230.488,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.969.588.718,00 atau 97,06 % di kategorikan sangat baik.

#### **2. Langkah / Strategi mendatang untuk Peningkatan Kinerja ke depan**

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya

Demikian Laporan Kinerja Tahunan 2023 (LKJiP) Kecamatan Jatiroto disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan LKJiP ini. Semoga LKJiP ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Lumajang, 31 Januari 2024



CAMAT JATIROTO

**KITJUM HADI KASIYAN, S.H.**  
NIP. 19680407198903 1 006

**LAMPIRAN LAMPIRAN :**

- 1. PERJANJIAN KINERJA 2023**
- 2. RENCANA AKSI 2023**
- 3. CAPAIAN KINERJA (LPPD)**
- 4. DATA DUKUNG EVALUASI KINERJA**
- 5. DOKUMENTASI KEGIATAN 2023**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IWAN HADI PURNOMO, S.STP. MM.**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **H. THORIQUH HAQ, M. ML**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

  
H. THORIQUH HAQ, M. ML

Pihak Pertama

  
IWAN HADI PURNOMO, S.STP.MM.  
NIP. 19750921199602 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,33%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	94,44%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,56%
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Prsentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 83%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1,725,576,486,00	Sumber DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,200,000,00	Sumber DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	156,595,000,00	Sumber DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,585,000,00	Sumber DAU
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,400,000,00	Sumber DAU
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163,935,000,00	Sumber DAU
<b>JUMLAH</b>	<b>2,062,291,486,00</b>	

Lumajang, 10 Januari 2023

  
**H. THORIOUL HAQ, M. ML.**

  
**IWAN HADI PURNOMO, S.STP.MM.**  
 NIP. 19750921199602 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUTUM HADI KASIYAN, S.H.

Jabatan : CAMAT JATIROTO

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pihak Pertama

KUTUM HADI KASIYAN, S.H.  
NIP. 19680407198903 1 006

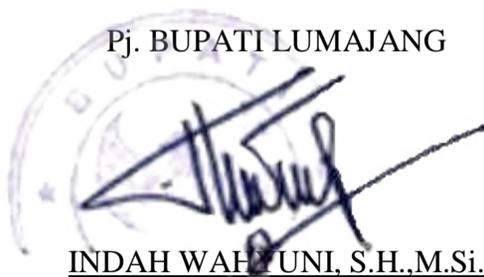
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,33%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	94,44%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Prsentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 83%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.743.965.488,00	Sumber DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,200,000,00	Sumber DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	105.145.000,00	Sumber DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,585,000,00	Sumber DAU
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,400,000,00	Sumber DAU
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163,935,000,00	Sumber DAU
<b>JUMLAH</b>	<b>2.029.230.488,00</b>	

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHIDUNI, S.H.,M.Si.

KECAMATAN JATIROTO



KUTUMNADI KASIYAN, S.H.  
NIP. 19680407198903 1 006

















		61%	-	-	39%	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,150,000,00	Kasubag. Umum & Kepegawaian	V	V	V	-	-	-	-	-	V	V	V	
		4%	96%	-	-	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	137,417,787,00	Kasubag. Umum & Kepegawaian	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	
						<b>BAGIAN ...</b>																	
		-	-	50%	50%	<b>II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	1,200,000,00	1. Kasubag. Umum & Kepegawaian 2. Kasi Pelayanan Umum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
						<b>Kegiatan:</b>																	
		-	-	50%	50%	9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,200,000,00	1. Kasi Pelayanan Umum 2. Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	V
		-	-	50%	50%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dok	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.200.000,00	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	V













		27%	-	24%	49%	4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dok	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.175.000,00	-	V	-	-	-	-	V	-	-	V	-	V	
		-	-	100 %	-	5.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	
		-	-	-	100%	6.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Lap	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V



**IWAN HADI PURNOMO, S.STP. MM.**  
 NIP. 19750921199602 1 002

**CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

OPD : KECAMATAN JATIROTO

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					KEUANGAN				
						Target		Realisasi		%	Target		Realisasi		%
						Angka	Satuan	Angka	Satuan		Angka	Satuan	Angka	Satuan	
1	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jatiroto	Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor</b>	100%	Persen	100%	Persen	100.00%	1,743,965,488		1,687,575,718		96.77%
			Perbup Kabupaten Lumajang No. 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Tata Kerja	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	Persen	100%	Persen	100.00%	7,000,000		6,139,200		87.70%
				Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00%	1,500,000		1,500,000		100.00%
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	2,000,000		2,000,000		100.00%
				Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	100.00%	3,500,000		2,639,200		75.41%
				<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat daerah</b>	100%	Persen	100%	Persen	100.00%	1,232,263,225		1,189,004,934		96.49%
				Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Orang	10	Orang	100.00%	1,208,317,225		1,165,215,434		96.43%
				Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00%	21,276,000		21,276,000		100.00%
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00%	1,920,000		1,763,500		91.85%
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Laporan	5	Laporan	100.00%	750,000		750,000		100.00%
				<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	Persen	100%	Persen	100.00%	710,000		710,000		100.00%

				Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	400,000		400,000	100.00%
				Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	310,000		310,000	100.00%
				<b>Kegiatan : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,994,000</b>		<b>5,994,000</b>	<b>100.00%</b>
				Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	25 Paket	100.00%	5,994,000		5,994,000	100.00%
				<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,000,993</b>		<b>72,580,543</b>	<b>96.77%</b>
				Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%	1,486,800		1,486,800	100.00%
				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00%	28,528,443		28,528,443	100.00%
				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100.00%	9,615,750		9,507,000	98.87%
				Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	4,500,000		3,707,300	82.38%
				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	30,870,000		29,351,000	95.08%
				<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100% Persen</b>	<b>1.00%</b>	<b>227,838,000</b>		<b>220,122,333</b>	<b>96.61%</b>
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	41,460,000		37,621,783	90.74%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	186,378,000		182,500,550	97.92%
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100% Persen</b>	<b>70% Persen</b>	<b>70.00%</b>	<b>7,731,483</b>		<b>7,731,483</b>	<b>100.00%</b>
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	1 Unit	33.33%	7,731,483		7,731,483	100.00%
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Pemeliharaan BMD</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100% Persen</b>	<b>100.00%</b>	<b>187,427,787</b>		<b>185,293,225</b>	<b>98.86%</b>

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	8 Unit		8 Unit	100.00%	32,860,000		30,879,325		93.97%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatannya dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit		4 Unit	100.00%	17,150,000		17,150,000		100.00%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	100.00%	137,417,787		137,263,900		99.89%

Permasalahan yang dihadapi pada Program A

1. Pemahaman terkait Tusi belum optimal
2. Kurang optimalnya administrasi keuangan
3. Kurang SDM Keuangan
4. Sarana dan prasarana kurang optimal

Upaya mengatasi permasalahan Program A

1. Pembinaan internal terkait Tusi
2. Pembinaan administrasi keuangan oleh PD terkait
3. Optimalisasi SDM yang ada
4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan mengajukan usulan sesuai prioritas kebutuhan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				KEUANGAN					
						Target		Realisasi		%	Target		Realisasi		%
						Angka	Satuan	Angka	Satuan		Angka	Satuan	Angka	Satuan	
2	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jatiroto	Perbup Kabupaten Lumajang No. 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	Persen	100%	Persen	100.00%	1,200,000		1,200,000		100.00%
			SK No. 8 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	Persen	100%	Persen	100.00%	1,200,000		1,200,000		100.00%
			Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	Dokumen	6	Dokumen	100.00%	1,200,000		1,200,000		100.00%

Permasalahan yang dihadapi pada Program B .....

1. Standar pelayanan dan SOP belum optimal
2. -

Upaya mengatasi permasalahan Program B .....

1. Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
2. Pembinaan petugas Kecamatan
3. Pembaharuan SP dan SOP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				KEUANGAN					
						Target		Realisasi		%	Target		Realisasi		%
						Angka	Satuan	Angka	Satuan		Angka	Satuan	Angka	Satuan	

3	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jatiroto	Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100	Persen	100	Persen	100.00%	88,645,000	0	87,191,000	98.36%
			Perbup Kabupaten Lumajang No. 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	100	Persen	100	Persen	100.00%	88,645,000	0	87,191,000	98.36%
				<i>Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	Lembaga	9	Lembaga	100.00%	600,000		600,000	100.00%
				<i>Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	3,810,000		3,810,000	100.00%
				<i>Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	6	Laporan	6	Laporan	100.00%	84,235,000		82,781,000	98.27%
				<b>Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	100	Persen	100	Persen	100.00%	16,500,000		16,457,000	99.74%
				<i>Sub Kegiatan : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	Keluarga	50	Keluarga	100.00%	3,000,000		3,000,000	100.00%
				<i>Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Keluarga	50	Keluarga	100.00%	3,000,000		3,000,000	100.00%
				<i>Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50	Keluarga	50	Keluarga	100.00%	10,500,000		10,457,000	99.59%

Permasalahan yang dihadapi pada Program C .....

1. Rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap arti dan tugas pemberdayaan masyarakat desa, sehingga minim inovasi pemberdayaan masyarakat
2. Giat fasilitasi Bantuan Sosial, Ketahanan Pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrim tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai

Upaya mengatasi permasalahan Program C .....

1. Pembinaan Perangkat Desa terhadap tuisi pemberdayaan

2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan mengajukan usulan sesuai prioritas kebutuhan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					KEUANGAN				
						Target		Realisasi		%	Target		Realisasi		%
						Angka	Satuan	Angka	Satuan		Angka	Satuan	Angka	Satuan	
4	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jatiroto	Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase fasilitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	100	Persen	100.00%	12,585,000		12,585,000		100.00%
			Perbup Kabupaten Lumajang No. 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	<b>Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	Jumlah fasilitas koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	1	Fasilitas	1	Fasilitas	100.00%	12,585,000		12,585,000		100.00%
				<i>Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	8,085,000		8,085,000		100.00%
				<i>Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	2	Laporan	100.00%	4,500,000		4,500,000		100.00%

Permasalahan yang dihadapi pada Program D .....

1. Pembinaan LINMAS belum sepenuhnya mencakup semua personil Di desa
2. Masih adanya gangguan trantibum yang disampaikan Toga Tomas

Upaya mengatasi permasalahan Program D .....

1. Peningkatan volume Pembinaan LINMAS secara bertahap
2. Koordinasi dengan Forkompimca, PTPN dan SGN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					KEUANGAN				
						Target		Realisasi		%	Target		Realisasi		%
						Angka	Satuan	Angka	Satuan		Angka	Satuan	Angka	Satuan	
5	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jatiroto	Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	100	Persen	100.00%	2,400,000		2,400,000		100.00%
			Perbup Kabupaten Lumajang No. 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Fasilitas	1	Fasilitas	100.00%	2,400,000		2,400,000		100.00%

				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	2,400,000	2,400,000	100.00%
--	--	--	--	---	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------

Permasalahan yang dihadapi pada Program E .....

1. Masih adanya gangguan TRANTIBUM
2. -

Upaya mengatasi permasalahan Program E .....

1. Peningkatan volume patroli Bersama
2. -

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					KEUANGAN				
						Target		Realisasi		%	Target		Realisasi		%
						Angka	Satuan	Angka	Satuan		Angka	Satuan	Angka	Satuan	
6	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Jatiroto	Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100.00%	163,935,000	162,180,000	98.93%		
			Perbup Kabupaten Lumajang No. 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi		Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100.00%					
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	83	Persen	83	Persen	100.00%					
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	6	Desa	6	Desa	100.00%	163,935,000	162,180,000	98.93%		
					Jumlah Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	6	Desa	6	Desa	100.00%					
					Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	5	Desa	5	Desa	100.00%					
				Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	Dokumen	3	Dokumen	25.00%	2,250,000	1,800,000	80.00%		
				Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	6	Dokumn	50.00%	152,100,000	152,100,000	100.00%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi : Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dokumen	6	Dokumen	100.00%	2,610,000	1,305,000	50.00%		

			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	5,175,000		5,175,000		100.00%
			Sub Kegiatan Fasilitasi : Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	600,000		600,000		100.00%
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	1,200,000		1,200,000		100.00%

Permasalahan yang dihadapi pada Program F .....

1. Kuantitas dan kompetensi Aparatur Desa belum optimal
2. -

Upaya mengatasi permasalahan Program F .....

1. Pembinaan dalam proses perencanaan kegiatan, penganggaran, penyusunan laporan anggaran serta pertanggungjawaban administrasi keuangan desa bagi Aparatur Desa,
2. Surat permohonan pengisian perangkat desa

#### TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja para Camat yang senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dalam proses perencanaan kegiatan, penganggaran, penyusunan laporan anggaran serta pertanggungjawaban administrasi keuangan desa bagi Aparatur Desa, 2. Surat permohonan pengisian perangkat desa	1. Adanya inovasi Ngobras Klambi 2. Komitmen pimpinan (camat) bersama Tim BINWAS terkait evaluasi hasil BINWAS 3. Aparatur pemerintah Kecamatan sudah memahami mekanisme penyusunan dokumen pemerintahan desa
2	Dihimbau kepada para Camat untuk lebih memberikan motivasi kepada para koordinator pendamping desa dan pendamping desa untuk membantu memperbaiki akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa	Melakukan Upaya melakukan Pembinaan dan pertemuan rutin setiap hari Senin di Kecamatan Jatiroto dengan mengumpulkan semua Tenaga Pendamping Desa	Adanya laporan / feedback setiap minggu bagi setiap TPD

**DATA REALISASI  
INDIKATOR KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024**

Perangkat Daerah : KECAMATAN JATIROTO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA	KETERSEDIAAN DATA DUKUNG PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto	hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83.85	84.12	78.94	Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan dalam persiapan data Evaluasi kinerja	1. Pembinaan oleh Pimpinan Kecamatan bersama staf dalam menjalankan tupoksi 2. Pembinaan Operator Adminduk oleh Disdukcapil	1. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing 2. Adanya koordinasi dan evaluasi internal secara berkala 3. Pelayanan Tepat Waktu 4. Adanya inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan online (Ayam Endul)	Bukti Nilai IKM berdasar Surat Setda Nomor 0654/3169/427.16/2023
Belum optimalnya publikasi terkait persyaratan adminduk							Petugas memperbarui Persyaratan pelayanan Adminduk yang dipublikasikan	Ombudsman		
Kurangnya sosialisasi dan publikasi terkait SOP Pelayanan kepada aparatur desa dan masyarakat							Sosialisasi SOP Pelayanan kepada Aparatur desa dan Masyarakat			
Perilaku petugas yang kurang 3S (Salam, senyum, sapa) dalam melaksanakan tugas pelayanan kependudukan kepada masyarakat							Memberikan evaluasi kepada Petugas secara rutin			
Sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelaksanaan tugas secara optimal							Perencanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan prioritas, mengoptimalkan sarpras yang ada	Rekap KIR Tiap Ruangan , Bukti Nilai IKM berdasar Surat Setda Nomor 0654/3169/427.16/2023		
Pengelolaan Pengaduan belum optimal							Memberikan nomor pengaduan, memberikan sosialisasi proses pengaduan via online	Bukti Nilai IKM berdasar Surat Setda Nomor 0654/3169/427.16/2023		

Mengetahui,  
**CAMAT JATIROTO**



**DATA REALISASI  
INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2023**

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiroto

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA	KETERSEDIAAN DATA DUKUNG PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi dikali (X) 100 %	91,33	93,33	85,71	<p>1. Beberapa Aparatur kecamatan yang kurang memahami tupoksi masing-masing</p> <p>2. Kompetensi aparatur Perangkat desa kurang maksimal Kondisi 3. keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Jatiroto yang belum kondusif</p> <p>4. 3 Desa di wilayah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN XI PG Jatiroto tidak mempunyai lokasi pembuangan sampah terpadu</p> <p>4. Sarana dan Prasaran belum memadai</p>	<p>1. Peningkatan Komitmen Aparatur kecamatan dan Pembinaan oleh Pimpinan bersama staf terkait faskor yang harus dilaksanakan</p> <p>2. Peningkatan Kompetensi aparatur desa melalui pembinaan desa</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak PG terkait penertiban wilayah, sarana pembuangan sampah dan perbaikan sarana prasarana di wilayah tanah HGU</p> <p>4. Melibatkan Pemerintahan Kabupaten Lumajang dan Pemerintahan Desa dalam hal melaksanakan MOU Sarana dan Prasarana</p> <p>5. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada</p> <p>6. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</p>	<p>1. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara kecamatan dengan pemerintah desa, PTPN XI, SGN, Kabupaten dan Forkompimcam</p> <p>2. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing</p>	<p>1. Anjab dan Sakip, 2. rekap FRC desa, 3. Laporan Kejadian 4. Surat permohonan pembangunan TPS 5. Rekap KIR Tiap Ruangan</p>

2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Desa RKP+APBDes+ LPPdes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 3 Dokumen dikali (X ) 100 %	88.33	94,44	88.89	1. Kuantitas dan kompetensi Aparatur Desa belum optimal	1. Pembinaan dalam proses perencanaan kegiatan, penganggaran, penyusunan laporan anggaran serta pertanggungjawaban administrasi keuangan desa bagi Aparatur Desa, 2. Surat permohonan pengisian perangkat desa	1. Adanya inovasi Ngobras Klambi 2. Aparatur pemerintah Kecamatan sudah memahami mekanisme penyusunan dokumen pemerintahan desa	B.A Monev , Rekapitulasi kekosongan Perangkat Desa
---	--	--	--	-------	-------	-------	---	---	--	--

Lumajang, 18 Januari 2024

Mengetahui  
**CAMAT JATIROTO**  
  
**KUTUM HADI KASIYAN, SH**  
 NIP. 19680407 198903 1 006

DATA REALISASI  
KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2023

Perangkat Daerah : KECAMATAN JATIROTO

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022		TARGET TAHUN 2023		REALISASI TAHUN 2023		KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA	KETERSEDIAAN DATA DUKUNG PERMASALAHAN
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan _____ (dibagi) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran yang direncanakan x 100 %	100.00	1,370,168,290.00	100.00	1,743,965,488.00	100	1,687,575,718.00	1. Pemahaman terkait Tusi belum optimal 2. Kurang optimalnya administrasi keuangan 3. Kurang SDM Keuangan 4. Sarana dan prasarana kurang optimal	1. Pembinaan internal terkait Tusi 2. Pembinaan administrasi keuangan oleh PD terkait 3. Optimalisasi SDM yang ada 4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan mengajukan usulan sesuai prioritas kebutuhan	Adanya koordinasi dan evaluasi internal secara berkala	1. Notulensi Rapat Staf meeting evaluasi kinerja 2. LRA 3. Anjab KIR 4. Rekap KIR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP _____ x 100 Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat	-	-	100.00	1,200,000.00	100	1,200,000.00	Standar pelayanan dan SOP belum optimal	1. Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil 2. Pembinaan petugas Kecamatan 3. Pembaharuan SP dan SOP	Pengelolaan pelayanan pengaduan yang baik	Hasil IKM, Notulen Pembinaan Aparatur Kecamatan hasil pelaporan masyarakat
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya rata-rata persentase fasilitasi pemebudayaan masyarakat	ata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah (prosentase fasilitasi pemberdayaan + Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dibagi 2 _____x 100 Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan	87.50	18,683,250.00	100.00	105,145,000.00	100.00	103,648,000.00	1. Rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap arti dan tugas pemberdayaan masyarakat desa, sehingga minim inovasi pemberdayaan masyarakat 2. Giat fasilitasi Bantuan Sosial, Ketahanan Pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrim tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai 2.	1. Pembinaan Perangkat Desa terhadap tusi pemberdayaan 2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan mengajukan usulan sesuai prioritas kebutuhan	1. Koordinasi dengan Aparatur Desa 2. Komitmen aparatur Kecamatan melaksanakan Tusi Pemberdayaan	1. daftar Hadir pembinaan Aparatur Desa 2. Laporan kegiatan fasilitasi bansos, Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase pemenuhan upaya trantibumPersentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan _____ (dibagi ) jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	-	-	100.00	12,585,000.00	100	12,585,000.00	1. Pembinaan LINMAS belum sepenuhnya mencakup semua personil Di desa 2. Masih adanya gangguan trantibum yang disampaikan Toga Tomas	1. Peningkatan volume Pembinaan LINMAS secara bertahap 2. Koordinasi dengan Forkompimca, PTPN dan SGN	1. Sudah adanya SK terkait Linmas 2. Koordinasi yang baik dengan toga tomas, lintas sektor (TNI dan POLRI) dan Pihak PTPN/SGN	1. Daftar hadir pembinaan LINMAS, SK LINMAS tiap desa 2. Notulensi Rakor Toga Tomas
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	100.00	2,400,000.00	100.00	2,400,000.00	100	2,400,000.00	Masih adanya gangguan TRANTIBUM	Peningkatan volume patroli Bersama	Koordinasi yang baik dengan lintas sektor (TNI dan POLRI)	rekapitulasi Laporan kejadian gangguan TRANTIBUM

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	(Jumlah desa yang menetapkan dokumen apbdes tepat waktu / jumlah desa) x 100%	100.00	149,400,000.00	100.00	163,935,000.00	100.00	162,180,000.00	Kuantitas dan kompetensi Aparatur Desa belum optimal	Pembinaan dalam proses perencanaan kegiatan, penganggaran, penyusunan laporan anggaran serta pertanggungjawaban administrasi keuangan desa bagi Aparatur Desa,	Adanya inovasi Ngobras Klambi	Jadwal BINWAS, BA Monev, BA Verlap
			Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	(Jumlah desa yang menetapkan dokumen lppdes tepat waktu / jumlah desa) x 100%	83.00		83.00		66.67		2. Surat permohonan pengisian perangkat desa	Komitmen pimpinan (camat) bersama Tim BINWAS terkait evaluasi hasil BINWAS		
			Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	(Jumlah desa yang menetapkan dokumen rkpdes tepat waktu / jumlah desa) x 100%	83.00		100.00		100.00			2. Aparatur pemerintah Kecamatan sudah memahami mekanisme penyusunan dokumen pemerintahan desa		
					69.19		1,540,651,540.00		2,029,230,488.00		95.83	1,969,588,718.00		

Lumajang, 18 Januari 2024

Mengetahui,  
 CAMAT JATIROTO  
  
 KURNIAHATI NASIYAN, SH  
 NIP. 19680107 198903 1 006

No.	AKTIVITAS	KECAMATAN						Jumlah	%	KETERANGAN	
			JATIROTO	KALIBOTO LOR	KALIBOTO KIDUL	ROJOPOLO	SUKOSARI				BANYUPUTIH KIDUL
										Bukti Dukung : B. Acara, rapat, SK, Dokumen lainnya	
1	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	Perdes Kewenangan desa (contoh. SKD,BPD dll)
2	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes								0	0.00%	BA Monev Perdes RPJMD
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes								0	0.00%	Tidak adaPerubahan RPJMD
4	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev,Dokumen RKPDes
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Verifikasi. Perdes perubahan
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Verifikasi, Raperdes perub APBDes
7	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Verifikasi, Raperdes perub APBDes
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	Perdes Stuktur perangkat desa
9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Aset dan Buku Aset Desa
10	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Rutin tribulan
11	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes		√	√		√	√		4	100.00%	Perdes BUMDesa Telah ada namun 2 Desa Belum Menyelenggarakan
12	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes		√	√		√	√		4	100.00%	Perdes BUMDesa Telah ada namun 2 Desa Belum Menyelenggarakan
13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Rutin, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
14	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Rutin tribulan
15	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Rutin tribulan
16	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev DD,ADD

No.	AKTIVITAS	KECAMATAN							Jumlah	%	KETERANGAN
			JATIROTO	KALIBOTO LOR	KALIBOTO KIDUL	ROJOPOLO	SUKOSARI	BANYUPUTIH KIDUL			
	<b>Fasilitas pembinaan Administrasi Lainnya.</b>								0	0.00%	
17	Fasilitas pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	Hasil Verifikasi APBDes dan BA Monev
18	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Rutin tribulan
19	Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Rutin tribulan
20	Fasilitas Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Semester 1 dan II
21	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Realisasi APBdes
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Peningkatan Kapasitas Aparatue Desa
23	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Rapat Sinkronisasi usulan 2024 seuai Prioritas DD
24	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Rapat Kamus Usulan
25	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Rapat Kamus Usulan
26	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Musrenwal RKPDes
27	Fasilitas Musdes yang partisipatif;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	Daftar Hadir, BA Rapat
28	Fasilitas Musrenbangdes yang partisipatif;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	Daftar Hadir, BA Rapat
29	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	Daftar Hadir, BA Rapat
30	Fasilitas Penyusunan RPJMDes yang partisipatif								0	0.00%	tidak ada perubahan RPJMDes
31	Fasilitas Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;								0	0.00%	tidak ada perubahan RPJMDes
32	Fasilitas Penyusunan RKPDes partisipatif		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA rapat penyusunan RKPDes
33	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;		√	√	√	√	√	√	6	100.00%	BA Monev Musrenbangdes;



**REKAPITULASI DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2023**



Koordinasi Rapat PPK



Screning Kesehatan oleh Puskesmas Jatiroto di pendopo Kecamatan Jatiroto



Kasi PMD melakukan pemantauan warga gangguan jiwa di dusun Sukosari desa Sukosari bersama Tenaga Kesehatan Puskesmas Jatiroto dan TKSK Kec Jatiroto

## REKAPITULASI DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2023



MONEV RKPDES 2024 Desa ROJOPOLO



MONEV RKPDES 2024 Desa JATIROTO



oordinasi rencana kegiatan pembagian bantuan beras hari Rabu  
tgl 27/9 di masing2 desa



Menghadiri rapat pembahasan laporan pendahuluan penyusunan PDRB kab Lumajang.



Menghadiri undangan pembubaran panitia ruwat desa rojopolo



Rapat Koordinasi PERCEPATAN PENGUMPULAN RKP DESA TA. 2024



Upacara Setiap Pagi Rutin di Halaman Kantor Kecamatan Jatiroto diikuti oleh seluruh ASN , Kepala Desa , UPT dan Lintas Sektor Kecamatan Jatiroto



Kegiatan penyaluran bantuan permakanan bagi lansia di kecamatan Jatiroto

**REKAPITULASI DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2023**



Koordinasi Permasalahan wilayah Kasus Penganiyaan oleh Tokoh Masyarakat An. Kusman dkk



Patroli gabungan kondusifitas wilayah di kecamatan jatiroto di Desa Desa se Kecamatan Jatiroto



Menyerahkan bantuan permakanan di dusun kebonan Bakid



Himbauan untuk melaksanakan sholat Istisqo (minta hujan ) secara serentak di masjid masjid Kecamatan Jatiroto



Kegiatan Camat Camat Paripurna DPRD



Rencana tindak lanjut Rapat Koordinasi Pasar Desa (Selasa, 31 Oktober 2023)



Rapat koordinasi Rehabilitasi RTLH di DPKP Lumajang



Rapat Koordinasi staf pelayanan  
Kecamatan Jatiroto



Pelayanan Kecamatan Jatiroto  
tertib dan lancar



apat Koordinasi PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN sebagai dasar  
kebijakan penyusunan penggunaan dana Desa.



Monitoring dan Evaluasi KTR(Kawasan Tanpa Rokok) oeh Tim  
Kabupaten Lumajang di kec jatiroto



Menghadiri sosialisasi SRIKANDI NADINE Kabupaten Lumajang , Rakhmat  
Syahrial dan DiftaPutri

## REKAPITULASI DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2023



Tim dari Kec Jatiroto berkunjung ke Ds Banyuputih Kidul terkait monetoring kegiatan Pelaksanaan Pembangunan dana Desa tahap II sebagai syarat untuk pengajuan dana Desa tahap III



kunjungan tamu hari ini dari satpol PP dalam rangka koordinasi persiapan gelar budaya sosialisasi gempur rokok ilegal diKec. Jatiroto nati tanggal 24 November 2023



Monev desa rojopolo



Camat Jatiroto mengikuti sosialisasi DBHCHT di Malang



Monetoring di Desa Kaliboto Kidul...



Rapat koordinasi rutin bulan Nopember.



Sekcam Menghadiri rakor forum komunikasi pengawasan Lumajang terkait dg giat evaluasi santunan kematian kabupaten Lumajang



Pembinaan Satlinmas desa kaliboto kidul  
Yang hadir dalam kegiatan:  
1. Bpk Camat jatiroto  
2. Babinsa desa kaliboto kidul  
Narasumber:  
1. Satpol PP Kab. Lumajang yang diwakili Bpk. Adnin



Kegiatan Upacara Upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 nov

## REKAPITULASI DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2023



kegiatan sosialisasi pra kampanye disampaikan oleh Ketua Panwasca Jatiroto



Kordinasi pemenuhan pajak PBB 2023, d  
desa Banyuputih Kidul



Menghadiri acara maulid nabi di Ponpes Baru  
Walisongo Jatiroto



Kordinasi penyaluran bantuan beras  
Bulog utk masyarakat melalui kantor  
pos, HR Jumat 17 Nov 2023





Menghadiri rapat koordinasi LPTQ kec jatiroto terkait rencana giat MTQ tingkat kecamatan Jatiroto



Rakor bersama Muspika , Satpol PP dan Kades dalam rangka persiapan Gelar Budaya Gempur Illegal Pagelaran Reog Campursari Manunggal Jaya dalam rangka Harjalu 768



Penerima Bantuan Beras Bulog di desa Rojopolo sebanyak 900 orang



Penerima bantuan beras di Desa Jatiroto sebanyak 824 Orang